

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING  
MELALUI KESETARAAN GENDER DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

**ADINDA AMALIA PUTERI HUSAIN**

**A011201054**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



# **SKRIPSI**

## **PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING MELALUI KESETARAAN GENDER DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

**ADINDA AMALIA PUTERI HUSAIN**

**A011201054**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING  
MELALUI KESETARAAN GENDER DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

disusun dan diajukan oleh :

**ADINDA AMALIA PUTERI HUSAIN**

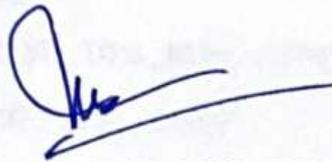
**A011201054**

telah diuji dan dipertahankan pada ujian skripsi:

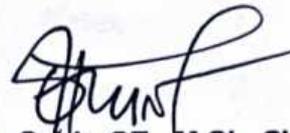
Makassar, 02 Juli 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

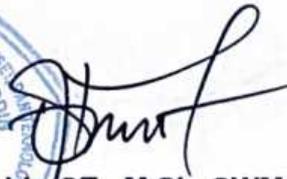


**Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®**  
NIP. 19601231 198811 1001



**Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®**  
NIP. 197407152002121003

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®**  
NIP. 197407152002121003

Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING  
MELALUI KESETARAAN GENDER DI KAWASAN TIMUR INDONESIA**

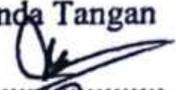
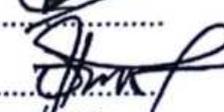
disusun dan diajukan oleh :

**ADINDA AMALIA PUTERI HUSAIN  
A011201054**

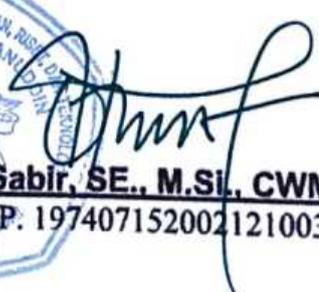
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Madris, SE., DPS., M.Si., CWM®.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Akbar Mandela Arumatalaba Yunus, SE., M.Si	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.**  
NIP. 197407152002121003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Adinda Amalia Puteri Husain**  
NIM : A011201054  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan/Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Stunting Melalui Kesetaraan Gender di Kawasan Timur Indonesia** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 02 Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
HE1ALX288412252

**Adinda Amalia Puteri Husain**



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Stunting Melalui Kesetaraan Gender Di Kawasan Timur Indonesia”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi ( SE ) pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah sangat membantu dalam penulisan skripsi baik secara langsung maupun tidak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya tersebut terutama untuk:

1. Kepada Allah SWT yang memberi rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, terima kasih atas doa dan restu, serta segala pengertian dan dukungannya baik secara moril maupun materil yang tidak pernah putus sehingga tibalah penulis pada masa akhir studi.
3. Adik-adik kandung penulis yang telah memberikan segala do'a, bantuan, motivasi, dukungan, nasehat dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Dr. Sabir, SE., M.Si CWM® yang juga merupakan penasehat akademik yang selalu memberikan masukan dan pesan-pesan moral selama masa studi.

Bapak Dr. H. Madris, DPS, M. Si CWM® dan Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si CWM® selaku pembimbing, terima kasih telah banyak meluangkan waktunya



untuk berdiskusi dan memberikan arahan serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

6. Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA dan Bapak Dr. Akbar Mandela Arumatalaba Yunus, SE., M.Si selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang berguna demi perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu dan nasihat selama penulis menjalani kewajiban sebagai mahasiswa.
8. Reihan Rahadian Arief selaku penyemangat menulis dalam menyelesaikan skripsi hingga akhir dan memberikan *support* terbesarnya dalam membimbing dan memberikan arahan baik secara moril maupun materil.
9. Dilala, Anggi dan Tharisya selaku sahabat penulis yang selalu merespon dan membantu penulis dalam meberikan saran-saran dalam kehidupan perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 02 Juli 2024.



Adinda Amalia Puteri Husain



## ABSTRAK

### PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP STUNTING MELALUI KESETARAAN GENDER DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Adinda Amalia Puteri Husain

Madris

Sabir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap stunting melalui kesetaraan gender di Kawasan Timur Indonesia. Variabel independennya ialah Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Non-SDM, sedangkan variabel dependennya ialah Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Stunting. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, SSGI, Riskesdas, dan DJPK. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dan diolah menggunakan *Software Eviews 12*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Non-SDM berpengaruh negatif terhadap stunting melalui indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.

**Kata Kunci:** Stunting, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM, dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Non-SDM.



## ABSTRACT

### THE INFLUENCE OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON STUNTING THROUGH GENDER EQUALITY IN THE EASTERN INDONESIA REGION

Adinda Amalia Puteri Husain

Madris

Sabir

This study aims to analyze the influence of government on stunting through gender equality in the Eastern Indonesia Region. The independent variables are Government Expenditure in the Human Resources Development Sector and Government Expenditure in the Non-Human Resources Development Sector, while the dependent variables are Gender Development Index, Gender Empowerment Index, and Stunting. This research uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency, SSGI, Riskesdas, and DJPK. The analysis model used is multiple linear regression and processed using Eviews 12 Software. The results of this study indicate that Government Expenditure in the Human Resources Development Sector and Government Expenditure in the Non-Human Resources Development Sector have a negative effect on stunting through gender development index and gender empowerment index.

**Keywords:** Stunting, Gender Development Index, Gender Empowerment Index, Government Expenditure in the Human Resources Development Sector and Government Expenditure in the Non-Human Resources Development Sector.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	v
<b>PRAKATA</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	viii
<b>ABSTRACT</b>	ix
<b>DAFTAR ISI</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Rumusan Masalah	7
1. 3 Tujuan Penelitian	7
1. 4 Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	9
2. 1 Landasan Teori	9
2.1.1 Stunting	9
2.1.2 Konsep Gender	11
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah	15
2. 2 Hubungan Antar Variabel	17
2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM terhadap Stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	17
2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang non-SDM terhadap Stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	21
2. 3 Penelitian Terdahulu	22
2. 4 Kerangka Pikir Penelitian	24
Hipotesis Penelitian	25
<b>METODE PENELITIAN</b>	26
Ruang Lingkup Penelitian	26



3.2	Jenis dan Sumber Data	26
3.3	Metode Pengumpulan Data	26
3.4	Metode Analisis Data	27
3.5	Definisi Operasional	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		<b>32</b>
4.1	Gambaran Umum Variabel	32
4.1.1	Stunting di Kawasan Timur Indonesia	32
4.1.2	Indeks Pembangunan Gender di Kawasan Timur Indonesia	34
4.1.3	Indeks Pemberdayaan Gender di Kawasan Timur Indonesia	36
4.1.4	Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM dan Non-SDM di Kawasan Timur Indonesia	38
4.2	Hasil Analisis Dan Pembahasan Variabel Penelitian	40
4.2.1	Hasil Analisis Regresi Berganda	40
4.5	Pembahasan	49
4.5.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang SDM Terhadap Stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	49
4.5.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Bidang Non-SDM Terhadap Stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender	51
<b>BAB V PENUTUP</b>		<b>54</b>
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Saran	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>56</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	24
Gambar 3.1 Model struktural kerangka penelitian	27
Gambar 4. 2 Data IPG di Kawasan Timur Indonesia 2023	35
Gambar 4. 3 Data IDG di Kawasan Timur Indonesia 2023	37
Gambar 4. 4 Model Struktural Variabel Penelitian	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi Stunting di KTI Tahun 2017-2021	3
Tabel 4.1 Data Prevalensi Stunting di Kawasan Timur Indonesia 2023	33
Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM dan Non-SDM di Kawasan Timur Indonesia 2023	39
Tabel 4. 3 Uji Analisis Regresi Berganda	40
Tabel 4. 4 Uji Analisis Regresi Berganda	42
Tabel 4. 5 Uji Analisis Regresi Berganda	45
Tabel 4. 6 Pengaruh Variabel dalam Metode Struktural	47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan terkait SDM yang terjadi di negara-negara dengan jumlah penduduk yang banyak seperti Indonesia adalah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (World Health Organization, 2015). Stunting pada anak merupakan dampak dari defisiensi nutrisi selama seribu hari pertama kehidupan. Stunting merupakan masalah yang sangat serius karena terkait dengan peningkatan resiko mordibitas dan mortalitas, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya di masa mendatang, orang dewasa yang pendek, buruknya perkembangan kognitif, produktivitas dan pendapatan yang rendah (Astria Paramashanti dkk., 2015)

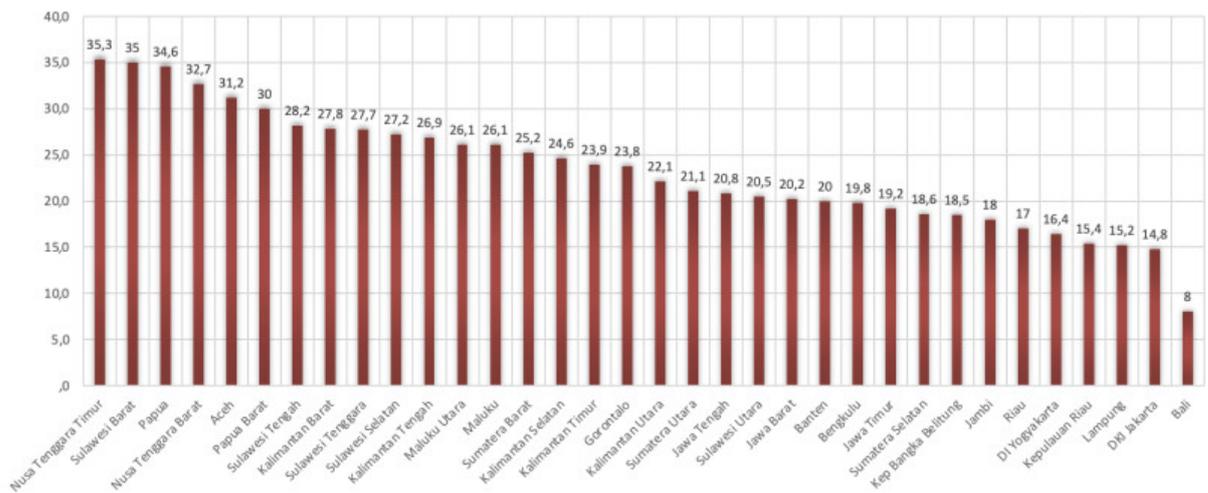
Menurut (WHO, 2017), dalam jangka pendek stunting dapat mempengaruhi perkembangan kognitif atau kecerdasan, motorik dan verbal seorang anak. Perkembangan kognitif pada anak sangatlah penting karena berkaitan dengan pola perkembangan mental yang meliputi kemampuan belajar, fokus, cara berfikir, kreatifitas dan kemampuan bahasa. Sedangkan dalam jangka panjang, stunting dapat menyebabkan postur tubuh seorang anak tidak akan optimal pada saat dewasa nanti termasuk kemungkinan terkena obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, menurunkan kesehatan reproduksi, tidak optimalnya kapasitas belajar dan performa saat masa sekolah dan tidak maksimalnya produktivitas ketika bekerja dengan ini stunting bisa menurunkan kualitas mutu SDM di masa depan.

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik  
a mengeluarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022



prevalensi anak penderita stunting usia dibawah lima tahun, Indonesia masih memiliki status stunting yang cukup sebesar 21,6 persen.

**Gambar 1.1 Prevalensi Balita Stunting (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi Tahun 2022**



Sumber: Kementerian Kesehatan (Survei Status Gizi Indonesia)

Berdasarkan data terlihat bahwa provinsi-provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi lebih banyak berkonsentrasi di Kawasan timur Indonesia (KTI). Kawasan Indonesia Timur adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara (termasuk Bali), Kepulauan Maluku, dan Papua. Tingkat stunting terbesar ada pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3 persen dan terendah tetapi masih diatas 5 persen, yaitu Provinsi Bali sebesar 8 persen.

Akar masalah stunting adalah krisis ekonomi politik, sehingga terjadi masalah utama yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan terbatas dan kesempatan kerja yang sempit (Setiawan & Machmud, 2018). Masalah tersebut terjadi karena masalah keterbatasan ketersediaan pangan di

umah tangga yang disebabkan oleh kemiskinan dan kesempatan kerja sempit, pola asuh (pengetahuan rendah dan sanitasi buruk) yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang buruk atau tidak



memadai yang disebabkan oleh masalah utama. Masalah-masalah tersebut mengakibatkan asupan gizi rendah yang disebabkan dari pola asuh dan keterbatasan keterbatasan pangan serta penyakit infeksi yang disebabkan dari pola asuh dan pelayanan kesehatan yang buruk atau tidak memadai sehingga terjadi masalah stunting (Rusliani dkk., 2022)

**Tabel 1.1 Prevalensi Stunting di KTI Tahun 2017-2021**

Tahun	Prevalensi Stunting (Persen)	Perubahan (Absolute)
2017	33,59	-
2018	32,36	-1,23
2019	30,65	-1,71
2020	29,43	-1,22
2021	27,98	-1,45

Sumber: SSGI diolah, 2023

Berdasarkan hasil riset Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, prevalensi stunting di wilayah KAWASAN TIMUR INDONESIA cenderung mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2017 stunting KAWASAN TIMUR INDONESIA berada di angka 33,59 persen dan mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 32,36 persen kembali mengalami penurunan hampir 2 persen pada tahun 2019 sebesar 30,65 persen seterusnya mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 27,98 persen. Penurunan stunting yang terjadi ini belum bisa dikategorikan sebagai hasil yang sangat memuaskan karena WHO sendiri menetapkan angka prevalensi *stunting* yang menjadi target global adalah di bawah 20persen. Hal ini sebagai upaya untuk menekan prevalensi

pada anak-anak di seluruh dunia dan mencapai target pembangunan  
 utan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target pemerintah  
 a sendiri adalah untuk menurunkan stunting hingga mencapai 14 persen



pada tahun 2024 sementara pada tahun tahun 2021 stunting di wilayah Kawasan Timur Indonesia sebesar 27,98 persen dan di Indonesia masih sebesar 24,04 persen.

Prevelansi stunting yang terjadi di wilayah kawasan timur Indonesia masih masuk kedalam kategori tinggi. WHO (2018), mengeluarkan indikator prevelansi stunting, jika prevalensi berada dibawah 2,5% terhitung sangat rendah, 2,5%-10% terhitung rendah, 10-20% terhitung menengah, 20%-30% masuk kedalam kategori tinggi, dan diatas 30% masuk kedalam kategori sangat tinggi. Stunting yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu melainkan juga dialami oleh keluarga yang tidak miskin atau yang berada diatas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi (Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan, 2017).

Berdasarkan pernyataan Badan Pusat Statistika (BPS), bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2030 yang di mana angkatan usia produktif akan mendominasi populasi penduduk dan menjadi penyangga perekonomian. Bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia, yaitu angkatan usia produktif (usia 15-64 tahun) yang diprediksi mencapai 68 persen dari total populasi. Hal yang sangat ditakutkan ketika bonus demografi itu terjadi adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang harus bersaing secara ketat. Masalah stunting yang hingga kini belum terselesaikan tentunya menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan

unting di Indonesia. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013, terkait Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, ada 13 kementerian yang sesuai



tugas pokok dan fungsinya melakukan pencegahan stunting. Pemerintah sampai tahun 2019, menetapkan 160 Kabupaten/Kota yang menjadi daerah prioritas penanganan stunting yang melingkupi 1.600 desa. Upaya pemerintah mencegah stunting dilakukan melalui program, pertama Peningkatan Gizi Masyarakat melalui program Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak. Kedua, Sanitasi berbasis Lingkungan melalui peningkatan kualitas sanitas lingkungan di 250 desa pada 60 Kabupaten/Kota, dengan target prioritas pada desa yang tingkat prevalensi stuntingnya tinggi. Ketiga, anggaran setiap desa dalam program ini sebesar 100 juta, dengan target minimal 20 kartu keluarga terlayani jamban individu sehat dan cuci tangan pakai sabun dan kebijakan yang menasar kepada warga miskin agar ada perubahan perilaku. Keempat, pembangunan infastruktur.

Pemerintah membangun infrastruktur air minum dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, salah satunya mencegah stunting. Dalam kurun waktu empat tahun pemerintah telah membangun Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pengolahan Air (TPA), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Kebutuhan akan kecukupan gizi bagi anak-anak adalah sejak masa kehamilan. Pemantauan kesehatan dan kecukupan gizi ini harus terus dilakukan sampai anak minimal memasuki usia dua tahun, usia lima tahun bahkan sampai dengan menginjak usia remaja karena pada masa tersebut sedang terjadi masa pertumbuhan, dimana sangat memerlukan asupan gizi yang memadai.

Rendahnya pendidikan ibu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang gizi

erat mempengaruhi kejadian balita stunting. Ibu dengan tingkat pendidikan rendah memiliki risiko 5,1 kali lebih besar memiliki anak stunting (Rahayu dkk., 2014).



Anak stunting lebih banyak terjadi pada anak yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan di bawah 9 tahun (Lestari dkk., 2014). Meningkatnya jumlah wanita yang bekerja di luar rumah juga mempengaruhi jumlah kejadian balita stunting. Persentase gizi kurang lebih tinggi pada balita dari ibu yang bekerja sebagai petani/nelayan, buruh harian, dan pengrajin dibandingkan ibu yang tidak bekerja (Devi, 2010).

Perempuan di masa sekarang sudah tidak lagi dikaitkan hanya dengan kodratnya sebagai seorang istri atau ibu saja, namun telah berkembang sedemikian rupa sehingga perempuan telah berperan dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Karena perempuan sekarang dapat mengembangkan diri pribadinya, dan turut serta menyumbangkan darmanya kepada masyarakat (Timban dkk., 2020). Perempuan sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kaitannya dengan lingkungan sosial dalam masyarakat. Perempuan mempunyai kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Perempuan dapat aktif dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti menjadi guru, dosen, pegawai dan lain-lain. Kegiatan ini mempunyai tempat tersendiri dalam arti, selain tugas dan kewajiban sebagai ibu dalam rumah tangga, perempuan dapat berperan melalui kegiatan-kegiatan lainnya. Perempuan yang mempunyai profesi seperti ini harus membagi waktunya dengan baik agar tanggung jawab sebagai ibu tidak terganggu. Menentukan dan membagi waktu agar tugas keluarga tidak dikurangi dan tidak dikesampingkan merupakan suatu beban dan tantangan bagi setiap ibu.

Pengeluaran pemerintah dalam bidang pengembangan bidang SDM dan non-SDM berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan dan

governance gender di Indonesia. Dengan adanya kualitas gender yang baik, mendorong perekonomian untuk terus berkembang dan berdampak pada



penciptaan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat dapat memiliki penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang tercukupi akan membuat potensi stunting terjadi akan lebih kecil. Oleh karena itu permasalahan stunting sama sekali tidak boleh dibiarkan, namun pemerintah perlu terus melakukan segala cara yang efektif dalam mereduksi prevalensi stunting yang ada di Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka menarik untuk meneliti terkait dengan **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pengembangan SDM terhadap Stunting Melalui Kesetaraan Gender di Kawasan Timur Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM berpengaruh terhadap stunting baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
2. Apakah Pengeluaran Pemerintah Bidang Non-SDM berpengaruh terhadap stunting baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM terhadap stunting baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.



2. Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM terhadap stunting baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan rujukan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan anggaran terkait dengan penurunan angka stunting di Kawasan Timur Indonesia.
2. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian terkait stunting.
3. Penelitian ini bermanfaat sebagai media informasi bagi masyarakat dalam mengetahui tentang pentingnya perbaikan gizi sejak usia dini. tentang kesehatan terkhusus masalah stunting.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh multi-faktorial dan bersifat antar generasi (Aryastami, 2017). Menurut (World Health Organization, 2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.

Stunting merupakan masalah yang sangat serius karena terkait dengan peningkatan resiko mordibitas dan mortalitas, obesitas, dan penyakit tidak menular lainnya di masa mendatang, orang dewasa yang pendek, buruknya perkembangan kognitif, produktivitas dan pendapatan yang rendah (Astria Paramashanti dkk., 2015).

Stunting terlihat berat kurang atau underweight jika dilihat dari berat badan menurut umur (BB/U), pendek atau sangat pendek jika dilihat dari tinggi badan menurut umur (TB/U) dan kurus atau wasting jika dilihat dari berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Dalam hal ini, berat kurang dan kurus merupakan dampak masalah kekurangan gizi yang bersifat akut, sedangkan pendek atau sangat pendek merupakan manifestasi kekurangan gizi yang bersifat kronik (Kemenkes, 2017).

Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U dimana dalam standar antropometri penilaian status gizi anak, hasil pengukuran berada pada ambang batas (Z-Score)  $<-2$  SD samapai dengan  $-3$  SD



(pendek/*stunted*) dan  $<-3$  SD (sangat pendek/*severely stunted*) (Kemenkes RI, 2016).

#### Rumus Z-Score Menentukan Status Gizi Anak

Tinggi/Panjang Badan menurut umur (TB/U & PB/U)

- Jika TB/PB anak  $<$  median

$$(TB/U) = \frac{\frac{TB}{PB_{anak}} - \frac{TB}{PB_{median}}}{\frac{TB}{PB_{anak}} - (tabel - 1SD)}$$

- Jika TB/PB anak  $>$  median

$$(TB/U) = \frac{\frac{TB}{PB_{anak}} - \frac{TB}{PB_{median}}}{(tabel + 1SD) - \frac{TB}{PB_{median}}}$$

- Jika TB/PB anak = median

$$(TB/U) = \frac{\frac{TB}{PB_{anak}} - \frac{TB}{PB_{median}}}{\frac{TB}{PB_{median}}}$$

Ada banyak faktor yang menyebabkan keadaan stunting pada anak. Faktor-faktor penyebab stunting ini dapat disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung dari stunting adalah asupan gizi dan adanya penyakit infeksi sedangkan penyebab tidak langsungnya adalah pola asuh, pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, faktor budaya, ekonomi, dan masih banyak lagi faktor lainnya (UNICEF, 2018).

Prendergast & Humphrey (2014), yang meneliti sindrom stunting pada negara-negara berkembang menunjukkan hasil bahwa stunting pada anak-anak di negara berkembang disebabkan oleh berbagai faktor seperti gizi buruk, infeksi, sanitasi yang buruk, dan faktor-faktor sosial ekonomi. Stunting pada balita berdampak terhadap tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan produktifitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan (TNP2K, 2018).



### 2. 1. 2 Konsep Gender

Menurut (WHO, 2024), gender adalah seperangkat peran, perilaku, kegiatan dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender menciptakan perbedaan dalam pencapaian antara laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai ketidaksetaraan gender. Di Indonesia, ketidaksetaraan ini diperkuat oleh perkembangan budaya patriarki yang lebih memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Budaya patriarki menetapkan peran publik bagi laki-laki, sementara perempuan sering terbatas pada peran domestik.

Terdapat dua kelompok besar dalam diskursus feminisme mengenai konsep kesetaraan gender dan keduanya saling bertolak belakang. Pertama adalah sekelompok feminis yang mengatakan bahwa konsep gender adalah konstruksi sosial, sehingga perbedaan perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial. Kelompok feminis lainnya menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan berstereotip gender. Kedua kelompok yang berbeda ini didasari oleh landasan teori dan ideologi yang berbeda, sehingga memberikan dasar analisis gender yang berbeda pula (Hubeis & Mulyandari, 2010).

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, 2008), tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender, Kesetaraan Gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk

oleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,



pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terdapat dua metrik untuk menilai dimensi gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidaksetaraan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, IDG memberikan ilustrasi apakah perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

### 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut (BPS, 2020) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG memiliki komponen pembentuk yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni komponen dari dimensi kesehatan, pengetahuan dan ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

Setiap komponen IPG distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPG. IPG dihitung



sebagai rasio antara (Indeks Pembangunan Manusia Perempuan) dengan (Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki), menggunakan rumus sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Adapun penghitungan  $IPM_P$  dan  $IPM_L$  sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pendapatan, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM_{Laki-Laki} = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

$$IPM_{Perempuan} = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

Interpretasi angka IPG, jika semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan kapabilitas antara laki-laki dengan perempuan semakin setara. Sebaliknya jika semakin jauh dari nilai 100 maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan kapabilitas antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2020).

## 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi, dan pengambilan keputusan penguasaan serat sumber daya ekonomi (Hartono, 2023).

Menurut (WHO, 1995), Indeks pemberdayaan gender atau Gender Empowerment Measure (GEM) adalah sebuah indeks gabungan yang mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi dasar pemberdayaan: partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan; partisipasi politik dan pengambilan keputusan; serta kekuasaan atas sumber daya ekonomi.



Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG (Wisnujati, 2020).

Untuk mendapatkan angka IDG atau GEM harus mencari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Bappenas, 2018). Adapun rumus untuk mendapatkan IDG adalah :

$$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)}}{3}$$

Keterangan:

$I_{(par)}$  : Indeks Keterwakilan di Parlemen

$I_{(DM)}$  : Indeks Pengambilan Keputusan

$I_{(inc-dis)}$  : Indeks Distribusi Pendapatan

Berdasarkan komponen diatas, IDG mampu menggambarkan seberapa besar peran aktif perempuan dalam bidang politik, proses pengambilan keputusan, dan sektor ekonomi. Dengan kata lain, nilai IDG mencerminkan tingkat pemberdayaan gender di Indonesia. Salah satu tanda pemberdayaan gender adalah ketika perempuan dapat berkontribusi (seperti halnya laki-laki) dalam sektor publik, arena politik, dan proses penciptaan pendapatan.



### 2. 1. 3 Pengeluaran Pemerintah

Dumairy (2006) dalam konsep ekonomi makro pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan:  $Y = C + I + G + (X-M)$ .

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran pemerintah setiap tahunnya dengan cara menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu (Sukirno, 2013)

Musgrave (1993), salah satu ekonom dari Amerika Serikat menyampaikan pandangannya mengenai pengeluaran pemerintah, di mana ia mengklasifikasikan pengeluaran tersebut menjadi tiga kategori, yaitu pengeluaran publik, transfer publik, dan subsidi publik. Pengeluaran publik meliputi pengeluaran yang digunakan untuk membeli barang dan jasa publik, seperti jalan raya, jembatan, dan rumah sakit. Transfer publik adalah pengeluaran yang digunakan



untuk membantu kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan, seperti tunjangan sosial dan bantuan pengangguran. Sedangkan subsidi publik adalah pengeluaran yang digunakan untuk memberikan insentif atau bantuan kepada produsen dan konsumen dalam suatu industri tertentu. Adapun menurut Musgrave tujuan dari pengeluaran pemerintah tersebut adalah untuk efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam penggunaan sumber daya pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dengan tepat dapat menjadi salah satu instrument kebijakan fiskal yang sangat membantu dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial, seperti inflasi, pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Robert, dkk, (1998) dalam (Laisina dkk., 2015), Pengeluaran pemerintah merupakan sekumpulan produk yang dihasilkan yang meliputi pilihan atau keputusan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintah (Pusat-Provinsi-Daerah).

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengklasifikasikan belanja pemerintah menurut fungsinya dibagi menjadi sebelas yaitu, fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi perlindungan sosial. Fungsi tersebut bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam pengelolaan keuangan negara.



### 1) Anggaran Pengembangan Bidang SDM

Anggaran pengembangan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mencakup sejumlah kegiatan dan inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas, keahlian, dan kapasitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi, instansi pemerintah, atau bahkan tingkat nasional. Beberapa komponen yang mungkin termasuk dalam anggaran pengembangan SDM meliputi bidang pendidikan dan juga kesehatan.

### 2) Anggaran Pengembangan Bidang Non-SDM

Penganggaran pengembangan bidang non-SDM mencakup alokasi dana untuk pembangunan dan peningkatan sektor-sektor lain di luar Sumber Daya Manusia (SDM). Ini dapat mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, teknologi, ekonomi, pertanian, pariwisata, dan lainnya. Pemerintah dalam negara berkembang sering mengalokasikan dana untuk berbagai sektor ini sebagai upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi tantangan atau kebutuhan khusus dalam pembangunan negara tersebut.

## 2.2 Hubungan Antar Variabel

### 2.2.1 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang SDM terhadap Stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Stunting menghambat potensi dan perkembangan sumber daya manusia karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi fungsi kognitif dan produktivitas saat dewasa. Keterlambatan pada semua elemen perkembangan anak dapat berdampak pada perkembangan



kognitif dan fisik, penurunan produktivitas, kesehatan yang buruk, dan risiko penyakit degeneratif. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan meningkatnya angka kesakitan dan kematian, berkurangnya kemampuan menyerap pelajaran, kesulitan dalam melakukan pekerjaan, dan berkurangnya pendapatan keluarga, sehingga menyebabkan sebagian besar orang hidup dalam kondisi yang tidak memadai karena masalah keuangan dan sosial. Stunting dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu tentang pola makan anak, sanitasi yang buruk, dan kurangnya layanan kesehatan, antara lain (Kevin Meirza & Dwi Bayu Bawono, 2023)

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang, maka pemerintah harus mampu membangun gedung dan sistem pendidikan yang kompeten. Investasi pemerintah di bidang pendidikan merupakan wujud nyata komitmennya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Belanja pembangunan pendidikan dapat dibelanjakan secara merata untuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh penduduk Indonesia. Todaro yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tujuan pembangunan yang paling utama. Pendidikan menjadi faktor terpenting dalam mencapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, sehingga sangat penting dalam pembentukan kemampuan manusia dan, lebih luas lagi, dalam pertumbuhan seseorang (Hasibuan & Syahbudi, 2019).

Menurut Hurlock (1999), pengaruh ibu yang bekerja terhadap hubungan ibu dan anak, sebagian besar tergantung pada usia anak pada waktu ibu mulai bekerja. Jika ia mulai bekerja sebelum anak terbiasa



selalu bersamanya dan sebelum suatu hubungan terbentuk maka pengaruhnya akan mengakibatkan anak merasa kehilangan dan kurang perhatian.

Theodore W. Schultz (2010) menyatakan pentingnya investasi pemerintah dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya bantuan dari pemerintah semua masyarakat bisa memperoleh pendidikan yang layak terutama bagi masyarakat miskin. Investasi ini memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan.

Menurut Meier (2014) dalam (Kahang dkk., 2016), pengeluaran pemerintah di bidang sektor pendidikan akan berdampak positif pada peningkatan jumlah murid yang dapat menyelesaikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kualitas pendidikan yang baik akan membentuk sumber daya manusia yang unggul, terampil dan memiliki pengetahuan yang luas, sehingga akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan investasi dalam bidang pendidikan untuk mencapai pembangunan.

Indeks pembangunan gender terdiri atas dimensi kesehatan dengan indikator angka harapan hidup, dimensi pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita. Sedangkan Indeks pemberdayaan gender menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks



pemberdayaan gender terdiri atas dimensi politik dengan indikator keterwakilan perempuan di Parlemen dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan dimensi ekonomi dengan indikator distribusi pendapatan perempuan (BPS, 2017).

Alderman (2012) salah satu ekonom yang telah meneliti hubungan antara nutrisi dan pembangunan manusia. Alderman menyatakan bahwa pentingnya investasi pemerintah dalam program kesehatan dan gizi untuk mencegah Stunting dan memastikan perkembangan anak yang optimal. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yakni merencanakan, mengatur, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan UU Kesehatan, sumber daya di bidang kesehatan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah terkait dengan anggaran kesehatan, tenaga kesehatan, pembekalan kesehatan, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut bersumber dari APBN dan APBD yang sudah ditetapkan untuk bidang kesehatan.

Menurut Alfana dan Arif (2017), pembangunan gender bertujuan untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. Ketimpangan tersebut ditunjukkan dalam angka atau indeks. Semakin rendah indeksnya, maka semakin besar ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan di dalam pembangunan. Pemberdayaan gender yang diukur dengan indeks pemberdayaan gender (IDG), bertujuan untuk mengukur partisipasi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, pengambilan keputusan,



serta penguasaan sumber daya. Perhitungan IDG memiliki kesamaan dengan perhitungan IPG. Pertama-tama, Equally Distributed Equivalent Percentage (EDEP) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata, dihitung kemudian dibagi dengan nilai 50. Skor 50 dianggap sebagai kontribusi ideal setiap kelompok gender untuk semua komponen SDI. Tidak ada bobot khusus untuk salah satu metrik dalam perhitungan GDI. Indikator lain untuk mengukur GDI adalah bagian perempuan dalam pendapatan tenaga kerja, secara umum nilai bagian perempuan dalam pendapatan tenaga kerja menunjukkan bahwa upah yang diterima perempuan di sektor tenaga kerja lebih rendah daripada di sektor tenaga kerja dengan laki-laki.

### **2. 2. 2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Non-SDM terhadap Stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender**

Belanja pemerintah adalah bagian utama dari kebijakan fiskal yang utamanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang kuat sambil tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IDG dan IPG yang maksimal dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan



sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Salah satu cara menjaga kesejahteraan masyarakat adalah melalui alokasi dana pemerintah yang digunakan untuk berbagai fungsi seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kualitas perekonomian suatu bangsa dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sumber peningkatan kualitas tersebut diperoleh dari belanja untuk kesehatan, belanja pendidikan, dan fasilitas-fasilitas lain penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia (Lonni & Uppun, 2018).

Berkaitan dengan program penurunan stunting, pelaksanaan peningkatan status gizi ibu hamil khususnya Kurang Energi Kronik (KEK), merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan status gizi ibu hamil serta mengantisipasi agar bayi yang dilahirkannya tidak stunting dengan menyediakan makanan. Intervensi yang direncanakan akan dilakukan dengan menawarkan makanan tambahan kepada para ibu hamil berupa sandwich. Tujuannya untuk meningkatkan status gizi ibu hamil dengan indikator peningkatan lingkaran lengan atas (LiLA) (Akhmadi & Pasaribu, 2020).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Ibrahim dkk, (2015) data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, meliputi analisis univariat dan analisis Analisis statistik menggunakan uji cji-square. Hasil penelitian



menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu memiliki dampak signifikan terhadap kejadian Stunting pada anak usia 24-59 bulan di Puskesmas Barombong.

Setiawan & Machmud (2018), penelitian ini merupakan studi analitik observasional dengan desain *cross-sectional*. Berdasarkan analisis multivariat, faktor pendidikan ibu merupakan faktor yang memiliki hubungan paling dominan dengan kejadian stunting pada anak. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kesehatan, salah satunya adalah status gizi. Individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar mengetahui pola hidup sehat dan cara menjaga tubuh tetap bugar yang tercermin dari penerapan pola hidup sehat seperti konsumsi diet bergizi.

Alpin (2021), penelitian ini adalah observasional analitik dengan desain cross sectional dengan teknik purposive sampling. Hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square menemukan bahwa nilai  $p=0.001$  yang berarti bahwa secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan ibu dengan kejadian gizi buruk pada balita. Hal ini dapat dikatakan bahwa ibu yang tidak bekerja dapat mencegah untuk memiliki balita dengan status gizi buruk dibandingkan dengan ibu yang bekerja.

Jumhur (2023), menemukan bahwa PDRB sektor primer memiliki dampak positif dan signifikan terhadap stunting, kemungkinan disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor ini yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor sekunder dan tersier. Sebaliknya, PDRB sektor sekunder menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap stunting, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan industri dan manufaktur dapat berkontribusi pada penurunan angka stunting.

u, meskipun negatif, PDRB sektor tersier tidak secara signifikan  
garuhi angka stunting di Indonesia.

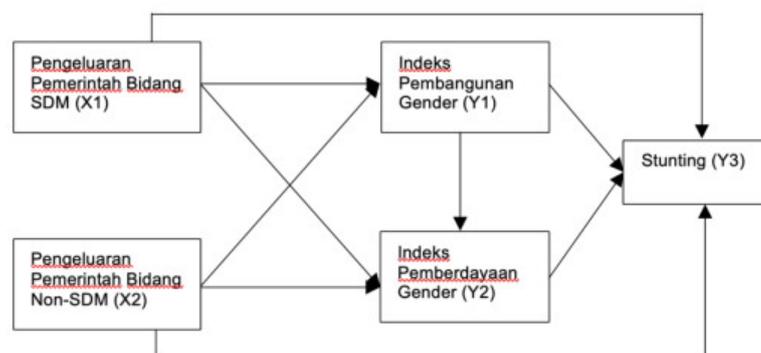


Wicaksono (2022), menemukan bahwa belanja bidang pembangunan berpengaruh positif namun tidak signifikan pada prevalensi stunting, yang dimana belanja bidang pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan dan perawatan infrastruktur seperti poskesdes, polindes, posyandu, PAUD, sanitasi dan air bersih.

## 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan mengurangi risiko terjadinya stunting. Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, dengan ini kesempatan berkarir seorang ibu menjadi semakin meningkat. Hal ini tentunya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan yang dimiliki seorang anak. Manajemen waktu yang dimiliki ibu untuk bekerja dan juga merawat anak tentu akan berpengaruh terhadap tingkat stunting yang ada di wilayah Kawasan Timur Indonesia.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka kerangka pikir penelitian dapat dirumuskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



## 2. 5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pemerintah dalam bidang SDM berpengaruh negatif terhadap stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Diduga pengeluaran pemerintah dalam bidang non-SDM berpengaruh negatif terhadap stunting melalui Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender baik secara langsung maupun tidak langsung.

